



**RENCANA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2020**

Sistematika RENJA menurut Permendagri 86 Tahun 2017

- A. PENDAHULUAN
  - 1. LATAR BELAKANG
  - 2. LANDASAN HUKUM
  - 3. MAKSUD DAN TUJUAN
  - 4. SISTEMATIKA PENULISAN
- B. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
  - 2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
  - 4. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
  - 5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
- C. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
  - 2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
  - 3. PROGRAM DAN KEGIATAN
- D. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- E. PENUTUP

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Renja BPKAD tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Renja BPKAD tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah BPKAD;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2021 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BPKAD Tahun 2021 merupakan:

1. Pedoman bagi BPKAD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah serta tujuan meraih predikat WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategik (Renstra).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok BPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

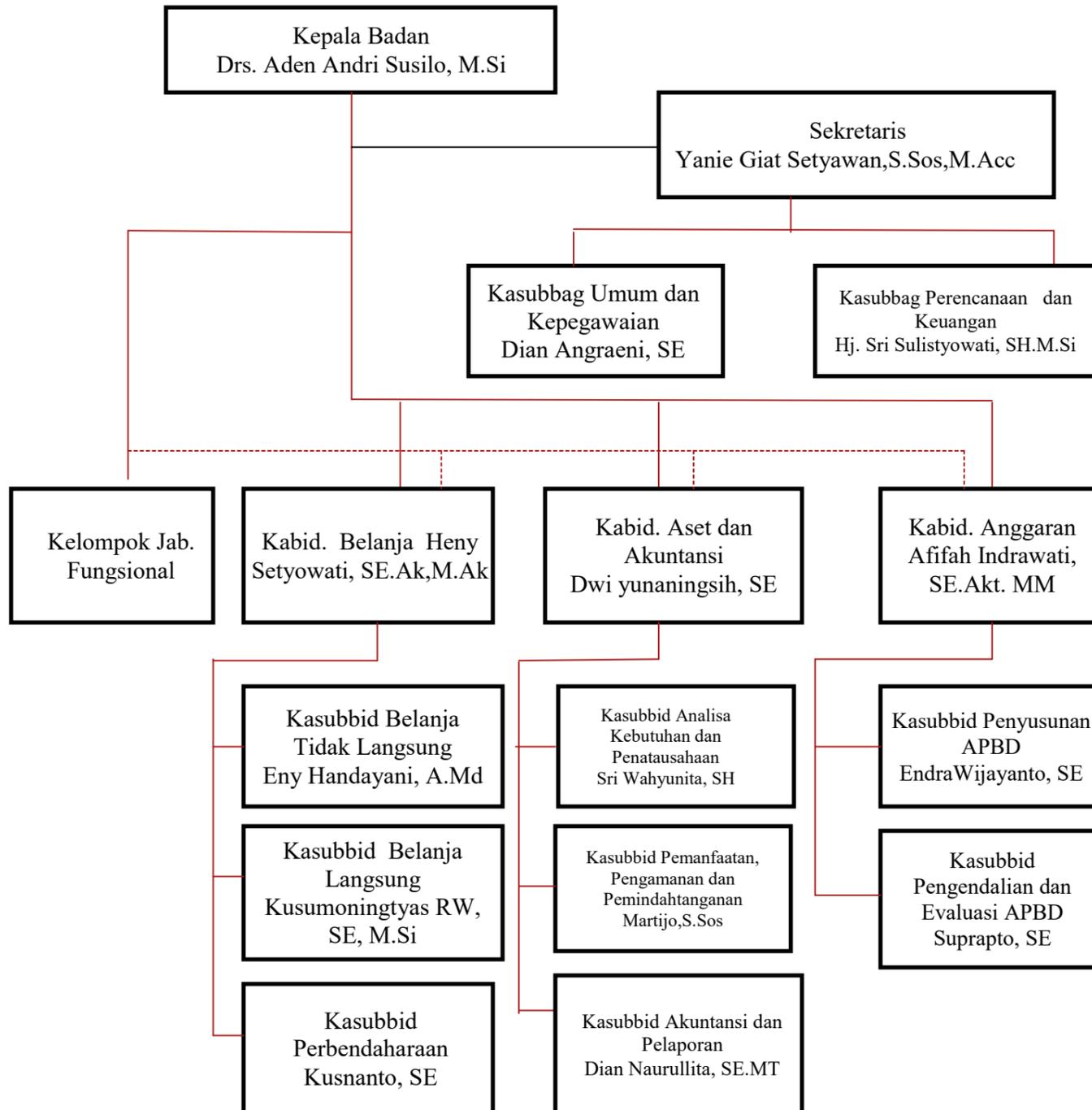
1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

5. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari atas (1) Kepala Badan, (2) Sekretariat, (3) Bidang Anggaran, (4) Bidang Belanja (5) Bidang Aset dan Akuntansi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
2. Sekretariat, membawahi :
  - 2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, membawahi :
  - 3.1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
  - 3.2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.
4. Bidang Belanja, membawahi :
  - 4.1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
  - 4.2. Sub Bidang Belanja Langsung;
  - 4.3. Sub Bidang Perbendaharaan.
5. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahi:
  - 5.1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
  - 5.2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan;
  - 5.3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



**(1) Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

**(2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki 2 sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

**(3) Bidang Anggaran**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Anggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi atas proses penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman Daerah;
- g. Penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah;

- h. Penyusunan standarisasi harga;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran memiliki 2 Subbidang yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengoordinasikan penyusunan dan melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, melaksanakan persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memvalidasi anggaran kas dan penyiapan Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah.

- b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah, penyiapan pinjaman dan pengelolaan utang Daerah, penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah dan penyusunan standarisasi harga.

#### **(4) Bidang Belanja**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan belanja, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian program kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar;
- b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. pelaksanaan pengendalian Belanja Daerah;
- d. pengelolaan penggajian pegawai;
- e. pelaksanaan dan pemantauan atas penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang ditunjuk;
- f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pelaksanaan penyimpanan dan penempatan uang Daerah;
- h. pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja memiliki 3 Subbidang yaitu:

a. Subbidang Belanja Tidak Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja tidak langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran Belanja Tidak Langsung, persiapan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung, rekapitulasi dan penyusunan laporan, analisa realisasi pencairan dan Belanja Tidak Langsung dan persiapan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran.

b. Subbidang Belanja Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran Belanja Langsung, persiapan Surat Perintah

Pencairan Dana Belanja Langsung, rekapitulasi dan penyusunan laporan dan analisa realisasi pencairan Belanja Langsung.

c. Subbidang Perbendaharaan

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana, koordinasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah di bank, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah meliputi penyiapan administrasi penyimpanan dan penempatan uang Daerah, pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, mempersiapkan pedoman dan petunjuk tentang administrasi keuangan Daerah, menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bidang Aset dan Akuntansi

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi barang milik Daerah;
- d. Pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- e. Pelaksanaan pemindahtanganan;
- f. Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional;

- g. Menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penunjukan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu;
- h. Pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- i. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang/kerugian Daerah;
- j. Pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Penyajian informasi keuangan Daerah dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah;
- l. Pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah;
- m. Pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja;
- n. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi memiliki 3 Subbidang yaitu:

a. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi dan pengolahan data barang milik daerah, pengkajian analisa kebutuhan barang berdasarkan hasil pengolahan data guna melakukan evaluasi terhadap belanja pengadaan barang, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan.

b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian atas

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional, pelaksanaan proses pemindahtanganan.

c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, penyusunan laporan realisasi semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyiapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pelaksanaan sinkronisasi data keuangan dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penyajian informasi keuangan Daerah, pengelolaan piutang/kerugian Daerah, penyiapan pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah, penyiapan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja, penyiapan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BPKAD tahun 2020 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja BPKAD tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan tujuan dari Renja BPKAD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis BPKAD tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

#### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BPKAD tahun 2021 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG (SOT PD dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2019 / n-2 ) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020/ n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU OPD).

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses

tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### A. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II  
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja tahun 2021. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan kali ke enam dan tiga tahun berturut-berturut Kabupaten Kebumen meraih Opini WTP, setelah sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2015, 2017 dan 2018.

Dengan penilaian dengan Opini WTP ini maka target IKU Kabupaten Kebumen berdasarkan RPJMD atau RKPD Tahun 2020 telah tercapai.

Untuk mempertahankan capaian tersebut sampai dengan akhir target RPJMD, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen semua Aparat Sipil Negara dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- c. Perbaiki yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- d. Tertib penyampaian laporan keuangan.
- e. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

- 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

- 1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

- 2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019 sampai dengan

Tahun 2020

Pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

Tahun anggaran 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran sejumlah Rp.23.356.579.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sejumlah Rp.5.429.700.000,00 dan Belanja langsung sejumlah Rp. 17.926.879.000,00 untuk melaksanakan 8 program dan 38 kegiatan (anggaran setelah perubahan).

Realisasi total anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2019 adalah Rp.22.015.428.060,00 atau 94,26% dari total anggaran Rp.23.356.579.000,00 Realisasi anggaran belanja tidak langsung sejumlah Rp. 5.035.053.758,00 atau 92,73% dari jumlah anggaran belanja tidak langsung Rp.5.429.700.000,00. Realisasi anggaran belanja langsung sejumlah Rp.16.980.374.302,00 atau 94,72% dari jumlah anggaran belanja langsung Rp.17.926.879.000,00.

Realisasi belanja tidak langsung hanya mencapai 92,73% karena belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan realisasi tidak sesuai disebabkan karena terdapat karyawan yang mengalami purna tugas, 2 (dua) karyawan meninggal dunia dan terdapat pejabat struktural yang *resign* / mengundurkan diri dari PNS. Sedangkan realisasi belanja langsung hanya mencapai 94,72% karena adanya efisiensi terhadap penggunaan air listrik dan telpun, belanja dan sisa tender kegiatan yang dipihak ketigakan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi APBD pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD), dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya hampir mencapai target yang telah ditentukan, pada tahun anggaran 2018 realisasi pendapatan daerah mencapai 99,72 dan tahun anggaran 2019 realisasi pendapatan daerah mencapai 100,38%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 data sampai dengan Mei

2020 realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 41,46%. Kontribusi pencapaian target pendapatan daerah didukung dari realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2018 mencapai 101,36% dan Tahun Anggaran 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi target tercapai sebesar 101,38%, tetapi terhadap dana-dana perimbangan belum memenuhi target transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pada Tahun Anggaran 2018 mencapai 98,26%, dan pada Tahun Anggaran 2019 baru mencapai 100,30% hal ini dikarenakan mendasari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, bahwa transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan memperhitungkan adanya SiLPA DAK Non Fisik dan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagai pengurang dana transfer DAK Non Fisik dan Dana Desa di tahun anggaran berjalan, sedangkan transfer DAK Fisik berdasarkan nilai kontrak yang sudah dientry pada *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN) dari Kementerian Keuangan RI, sedangkan transfer dana perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 sudah mencapai 41,43%. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang syah dua tahun anggaran sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2018 realisasi sudah mencapai target sebesar 102,80% dan Tahun Anggaran 2019 realisasi mencapai target sebesar 101,29%, sedangkan pada tahun anggaran 2020 berdasarkan data sampai Bulan Mei 2020 baru mencapai target 42,89%.

Untuk komposisi Belanja Daerah berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2018 antara Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung sebesar 61,47% dibanding 38,53% dan Tahun Anggaran 2019 antara Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung dengan komposisi 58,72% dibanding 41,28%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 komposisi Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung sebesar 62,25% dibanding 37,75%. Komposisi Belanja Tidak Langsung didominasi oleh Belanja Pegawai yang digunakan antara lain untuk pembayaran gaji Anggota DPRD, gaji Bupati/Wakil Bupati dan gaji ASN serta pembayaran tunjangan sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru dan tambahan penghasilan Non Guru serta insentif pemungutan PAD. Komposisi selanjutnya pada Belanja

Tidak Langsung yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan penerusan Dana Desa; diikuti komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sehingga hal ini menyebabkan komposisi pengalokasian anggaran Belanja Tidak Langsung berbanding terbalik dengan Belanja Langsung Adapun komposisi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal dan Belanja Pegawai.

Adapun realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 mencapai 94,28% dan pada Tahun Anggaran 2019 mencapai 92,17%. Sedangkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai bulan Mei 2020 baru terealisasi sebesar 29,18% dan diharapkan pada akhir tahun 2020 realisasi Belanja APBD minimal sama dengan tahun anggaran 2020 sebesar 92,17% atau bahkan bisa melampaui. Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2020 akan tercapai, manakala didukung kerja keras, kerja cerdas oleh semua unsur OPD dan dukungan Legislatif dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Terhadap target dan realisasi pendapatan daerah yang sudah dituangkan pada Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, dan Tahun anggaran 2020 (data sampai dengan Mei 2020) disampaikan sebagai berikut :

URAIAN	TA.2018			TA.2019			TA.2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI s/d MEI 2020	%
PENDAPATAN	2.647.019.919,000	2.639.814.864.397,90	99,72	2.807.794.410.000,00	2.818.494.983.540,68	100,38	2.878.556.768.000	1193552.435.809	41,46
- PAD	347.309.619,000	352.047.092.281,90	101,36	406.995.982.000,00	409.163.433.329,68	100,53	417.693.691.000	163.573.244.542	39,16
- DANA PERIMBANGAN	1.683.354.032,000	1.654.135.303.906,00	98,26	1.690.309.375.000,00	1.688.387.155.843,00	99,88	1.748.404.196.000	724.382.406.986	41,43
- LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	616.356.268,000	633.632.468.210,00	102,80	710.489.053.000,00	720.944.394.368,00	101,47	712.458.881.000	305.596.784.281	42,89
BELANJA DAERAH	2.812.902.414,000	2.652.047.980.376,00	94,28	3.001.516.790.000,00	2.809.549.444.627,00	93,60	3.033.756.768.000	885.127.531.745	29,17
- BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.728.997.326,000	1.676.515.529.592,00	96,97	1.762.524.195.000,00	1.707.700.081.835,00	96,88	1.888.463.325.000	740.727.287.002	39,22
- BELANJA LANGSUNG	1.083.905.088,000	975.532.450.784,00	90,00	1.238.992.595.000,00	1.101.849.362.792,00	88,93	1.145.293.443.000	144.400.244.743	12,60
SURPLUS/(DEFISIT)	(165.882.495,000)	(12.233.115.978,10)		(193.722.380.000,00)	8.945.538.913,68		(155.200.000.000)	308.424.904.064	
- PEMBIAYAAN PENERIMAAN	177.632.495,000	225.675.495.480,60		203.192.380.000,00	203.192.379.502,50		165.000.000	0,00	
- PEMBIAYAAN PENGELUARAN	11.750.000,000	11.750.000.000,00		9.470.000.000,00	9.470.000.000,00		10.300.000.000	9.550.000.000	
PEMBIAYAAN NETTO	165.882.495,000	213.925.495.480,60		193.722.380.000,00	193.722.379.502,50		155.200.000.000	(9.550.000.000)	
SiLPA	00	201.692.379.502,50		0,00	202.667.918.416,18		0,00	298.874.904.064	

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran (LKD Kabupaten Kebumen TA.2018, 2019 dan Realisasi Sampai Bulan Mei 2020), data diolah

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun 2020, dan realisasi Renstra BPKAD Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya surat menyurat	72	24	12	12	100%	12	48	66,66
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Penyediaan jasa	Terawatnya	72	36	12	12	100%	12	60	83,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	72	36	12	12	100%	12	60	83,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	60	24	12	12	100%	12	48	80
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	74	72	108	108	100%	22	202	272,97
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan paket perlengkapan kantor	15	7	2	2	100%	1	10	66,66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan paket peralatan gedung kantor	206	69	46	46	100%	1	116	56,31
	Pengadaan mebeleur	Pengadaan paket pengadaan mebeleur	130	158	130	130	100%	1	289	222,30
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPKAD	6	3	1	1	100%	1	5	83,33
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor BPKAD	550	199	34	34	100%	1	234	42,54
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Pengiriman aparatur untuk bimtek, workshop dan seminar terkait pengelolaan keuangan daerah	85	56	20	20	100%	20	96	112,94
	<b>Urusan Wajib</b>									
	<b>Perencanaan Pembangunan</b>									
	<b>Program pengembangan</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	<b>data/informasi</b>									
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya renja, RKA, DPA, LKPJ/LPPD,LAKIP	30	14	5	5	100%	5	24	80
	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>									
	Penyusunan analisis standar belanja	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang analisa Standar Belanja	1	0	0	0	0	1	1	100
	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya peraturan Bupati tentang Indeks	6	3	1	1	100%	1	5	83,33
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersedianya rancangan Perda APBD dan Perbup APBD	12	8	2	2	100%	2	12	100
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Tersedianya rancangan Perda	12	6	2	2	100%	2	10	83,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	perubahan APBD	APBD dan Perbup PAPBD								
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya raperda tentang APBD	12	8	4	4	100%	3	15	125
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	12	6	3	3	100%	2	11	91,66
	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Pengadaan papan nama aset daerah; terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4; terselesaikannya TPTGR	318	165	60	60	100%	50	275	86,47
	Pengelolaan Belanja Langsung	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara SKPD	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Pengelolaan Belanja tidak Langsung	Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai; lancarnya pengelola hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial	72	33	12	12	100%	12	57	79,16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Tersusunnya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan	12	8	4	4	100%	4	16	133,33
	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sinkronisasi Data Keuangan SKPD dan Pengesahan SPJ Fungsional SKPD	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota</b>									
	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan/ aset daerah	5	2	1	1	100%	2	5	100
	Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan dan evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan SKPD	1206	612	198	198	100%	198	1008	83,58
	Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	Terlaksananya pencairan bantuan	72	36	12	12	100%	12	60	83,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
		keunagan/ bantuan sosial, hibah, pembiayaan									
		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>									
		Pengendalian Kas Daerah	Pengelolaan dana APBD dan transfer daerah	72	36	12	12	100%	12	60	83,33
		<b>Statistik</b>									
		<b>Program Pengembangan data/ Informasi/ statistik daerah</b>									
		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	6	3	1	1	100%	1	5	83,33

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1			Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2			Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD	93	94	95	96	94	95,44	60,27	96	
3			Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	92,30	92,50	93,25	93,25	95,50	94,54	47,66	95,50	Capaian Tahun 2020 realisasi Capaian sampai dengan Mei 2020/Semester I
			Capaian realisasi belanja	90	90	90	90	92,46	92,17	29,18	90	
			Capaian Penerbitan Dokumen Keuangan Daerah tepat waktu	100	100	100	100	100	100	60	100	
			Capaian SKPD Tertib Administrasi Aset Tepat Waktu	80	80	83	83	90	85,60	60	83	
			Capaian Realisasi Pendapatan	100	100	100	100	99,54	100,38	41,46	100	

			Jumlah SKPD yang mengirim SPJ Fungsional Tepat Waktu	198	198	198	198	198	171	171	171	Tahun 2020 sudah tidak ada lagi unit kerja/ UPT Dikpora, sehingga jumlah Opd/Unit di tahun 2020 sebanyak 171
			Tersedianya data rekonsiliasi pelaporan keuangan daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, dinas mengacu pada visi Kabupaten Kebumen yaitu Menuju Kabupaten Kebumen yang modern, berkepribadian demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

BPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pengelolaan dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kebumen pada umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut meliputi :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan dan yang menangani pengelolaan keuangan cukup memadai;
- b. Koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan;

- c. Adanya komitmen pengelola keuangan sehingga realisasi keuangan kegiatan dapat mencapai target yang telah direncanakan.
- d. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- f. Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- g. Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan, melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset:
  - 1) Mengadakan pelatihan/Bimtek mengenai pengelola keuangan pada SKPD
  - 2) Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan
  - 3) Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
  - 4) Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
  - 5) Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- h. Tertib penyampaian Laporan Keuangan
- i. Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- k. Menerapkan mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT) secara bertahap mulai tahun 2018.
- l. Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI dengan penerapan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, Sidat Kedaton, SimGaji, SIPPAS, SIPATMA SP2D Online, Simbankeu dan SIBUBA.
- m. Pilot project bagi OPD yang sudah dianggap mampu melakukan verifikasi SPJ secara mandiri dengan mengoptimalkan fungsi PPK SKPD guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
- n. Menindaklanjuti segera rekomendasi BPK dengan melibatkan OPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2021. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan pada tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah dicapai tersebut, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilaksanakan dalam mencapai RPJMD 2016-2021.

Adapun beberapa permasalahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya :

1. Ketidakakuratan/ketidakvalidan Laporan Keuangan SKPD
2. Sumber Daya Manusia Pengurus Barang OPD/Pengurus Barang kurang memiliki kompetensi di bidang Penatausahaan Aset.
3. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata/belum tertib. Sedangkan dari sisi administrasi dan penyimpanan/pencatatan belum tertib.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen belum optimal dikarenakan masih kurang tertibnya pencatatan tertib administrasi barang milik daerah;
2. Diterapkannya system akuntansi berbasis akrual yang masih membutuhkan penyempurnaan dalam sistemnya.

Rencana penyelesaian adalah :

1. Tertib penyampaian laporan keuangan;
2. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
3. Mengadakan pelatihan/Bimtek Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD;
4. Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan;

5. Melakukan Sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait;
6. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset;
7. Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan berarti laporan keuangan Kabupaten Kebumen sempurna tanpa catatan. Ada beberapa hal atau isu strategis yang masih perlu ditingkatkan utamanya dalam hal penatausahaan aset/ada beberapa upaya yang dilakukan pada tahun 2021 untuk mempertahankan opini WTP antara lain :

- a. Masih banyak tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat sehingga diperlukan prioritas anggaran pensertifikatan tanah
- b. Tertib penyampaian laporan keuangan
- c. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- d. Mengadakan pelatihan / bimtek mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD
- e. Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan
- f. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
- g. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- h. Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Selain itu, pemerintah daerah juga untuk menetapkan rincian penerima Hibah dan Bansos dalam Lampiran III dan IV Perbup Penjabaran APBD, dan menyusun mekanisme pengendalian yang dapat mengontrol penyampaian laporan penggunaan dana dan pertanggungjawaban tepat waktu, dan mengoptimalkan perjanjian/MoU antara Dinas Pendidikan dengan Bank Jateng terkait mekanisme penyaluran Dana Bansos BKM dan mengevaluasi kebijakan terkait Dana Bansos BKM yang belum diambil oleh siswa. Dan melaksanakan penagihan atas keterlambatan dan kekurangan setoran retribusi parkir secara rutin kepada pihak KSU JP dan menagih kekurangan penerimaan Retribusi Parkir kepada KSU JP untuk di setor ke kas daerah dan

menghentikan penerbitan SPPT atas obyek PBB yang dimiliki Pemda Kebumen.

#### D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Prioritas pembangunan tahun 2021 antara lain :

1. Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
2. Pemanfaatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
5. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan PD yang disusun berdasarkan dokumen

Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
2. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Penyesuaian Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Adapun review Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>										
I.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Tesedianya Dokumen Panganggaran dan Regulasi	100%	993.908.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Tesedianya Dokumen Panganggaran dan Regulasi	100%	2.691.036.000	
1	Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	4 Dokumen	142.968.000	Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	4 Dokumen	263.538.000	
2	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	2 Dokumen	208.226.000	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	2 Dokumen	512.435.000	
3	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perbup	2 Dokumen	226.774.000	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perbup	2 Dokumen	439.230.000	

	tentang penjabaran Perubahan APBD		Penjabaran APBD Perubahan			tentang penjabaran Perubahan APBD		Penjabaran APBD Perubahan			
4	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanda dan Standar Satuan Harga	2 Dokumen	324.170.000	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanda dan Standar Satuan Harga	2 Dokumen	1.117.128.000	
5	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	8 Kegiatan	91.770.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	8 Kegiatan	358.705.000	
II.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Tertib Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah serta Pengelolaan Dana Perimbangan	100%	725.062.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Tertib Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah serta Pengelolaan Dana Perimbangan	100%	3.002.137.000	
6	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Kas Daerah dengan Bank	60 Dokumen	280.215.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Kas Daerah dengan Bank	60 Dokumen	293.552.000	
			Jumlah dokumen Rekonsiliasi harian	270 Dokumen				Jumlah dokumen Rekonsiliasi harian	270 Dokumen		
			Persentase laporan realisasi OPD	100%				Persentase laporan realisasi OPD	100%		
7	Pemrosesan, Penerbitan dan	BPKAD	Persentase Penerbitan	100%	110.672.000	Pemrosesan, Penerbitan dan	BPKAD	Persentase Penerbitan	100%	1.098.075.000	

	Pendistribusian Lembar SP2D		SP2D			Pendistribusian Lembar SP2D		SP2D			
8	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	BPKAD	Persentase Tertib Penelitian SPM dan Penerbitan SKPP	100%	166.185.000	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	BPKAD	Persentase Tertib Penelitian SPM dan Penerbitan SKPP	100%	512.435.000	
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	BPKAD	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	3 Dokumen	167.990.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	BPKAD	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	3 Dokumen	1.098.075.000	
			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan kepada PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD	4 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan kepada PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD	4 Kegiatan		
III.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	BPKAD	Tersusunnya dokumen pelaporan	100%	546.349.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	BPKAD	Tersusunnya dokumen pelaporan	100%	805.255.000	

	Pelaporan Keuangan Daerah		keuangan daerah dan terlaksananya rakor / pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah			Pelaporan Keuangan Daerah		keuangan daerah dan terlaksananya rakor / pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah			
10	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	172.711.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	439.230.000	
11	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	BPKAD	Jumlah dokumen pengesahan Laporan Fungsional SKPD	828 Dokumen	124.081.000	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	BPKAD	Jumlah dokumen pengesahan Laporan Fungsional SKPD	828 Dokumen	366.025.000	
12	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	65.361.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	0	
13	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan	BPKAD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	4 Kegiatan	184.196.000	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	BPKAD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	4 Kegiatan	0	

	Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		akuntansi keuangan daerah			Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		akuntansi keuangan daerah			
IV.	Kegiatan Penunjang Urusan	BPKAD	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	1000 Nasabah, 1 Paket dan 449 Desa	22.726.000.000	Kegiatan Penunjang Urusan	BPKAD	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	1000 Nasabah, 1 Paket dan 449 Desa	0	
14	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	BPKAD	Jumlah nasbah yang mendapatkan pemberian subsidi bunga kepada BUMD	1000 Nasabah	500.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	BPKAD	Jumlah nasbah yang mendapatkan pemberian subsidi bunga kepada BUMD	1000 Nasabah	0	
15	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	BPKAD	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	1 Paket	1.000.000.000	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	BPKAD	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	1 Paket	0	
		Jetis Desa Kutosari	Jumlah Ruas Jalan yang direhab	1 ruas	100.000.000		Jetis Desa Kutosari	Jumlah Ruas Jalan yang direhab	1 ruas	0	
		Drainase 300 Meter Desa Karanggedang RW 4 45.000.000; Panjang Jalan yang	Jumlah Lokasi Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	449 Desa	21.126.000.000		Drainase 300 Meter Desa Karanggedang RW 4 45.000.000; Panjang Jalan yang	Jumlah Lokasi Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	449 Desa	0	

		ditingkatkan 700 Meter, Jalan Menara Desa Tanggulangin RT. 02 dan 04 pada RW. 03 200.000.000; Panjang Jalan yang ditingkatkan 700 Meter Jalan Gilimati RT 02/01 Dukuh Jembatan Desa Karangdung 200.000.000; Panjang Talud Jalan yang dibangun 200 Meter Jalan Gilimati RT. 2/1 Dukuh Jembang					ditingkatkan 700 Meter, Jalan Menara Desa Tanggulangin RT. 02 dan 04 pada RW. 03 200.000.000; Panjang Jalan yang ditingkatkan 700 Meter Jalan Gilimati RT 02/01 Dukuh Jembatan Desa Karangdung 200.000.000; Panjang Talud Jalan yang dibangun 200 Meter Jalan Gilimati RT. 2/1 Dukuh Jembang				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		an Desa Karangga dung 150.000. 000; Pajang Talud Jalan yang dibangun 100 Meter Jalan petanaha n Guyanga n di Desa Nampud adi sebelah selatan rumah burung lawet timur jalan raya 100.000. 000; Tercapai nya Rehabilit asi Jalan Antar Kecmtan di Ruas Jalan Meles ke Jatiluhur 1 Paket Desa Meles						an Desa Karangga dung 150.000. 000; Pajang Talud Jalan yang dibangun 100 Meter Jalan petanaha n Guyanga n di Desa Nampud adi sebelah selatan rumah burung lawet timur jalan raya 100.000. 000; Tercapai nya Rehabilit asi Jalan Antar Kecmtan di Ruas Jalan Meles ke Jatiluhur 1 Paket Desa Meles					
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		Adimulyo 200.000. 000; Jumlah Unit/Lok asi Lapangan olahraga yang dibangun /dikemba ngkan 1 Unit Dukuh Kedunglo RT. 2 RW. 8 Desa Giritirto 280.000. 000; Tercapai nya perbaikn Lapangan olahraga Desa Kemujan Kecmtan Adimulyo 1 Paket Lapangan Desa Kemujan Kecmtan Adimulyo 200.000. 000; Tercapai nya perbaikn Lapangan						Adimulyo 200.000. 000; Jumlah Unit/Lok asi Lapangan olahraga yang dibangun /dikemba ngkan 1 Unit Dukuh Kedunglo RT. 2 RW. 8 Desa Giritirto 280.000. 000; Tercapai nya perbaikn Lapangan olahraga Desa Kemujan Kecmtan Adimulyo 1 Paket Lapangan Desa Kemujan Kecmtan Adimulyo 200.000. 000; Tercapai nya perbaikn Lapangan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Desa Banyurata Kecmtan Adimulyo ,1 Paket Lapangan Desa Banyurata Kecmtan Adimulyo 50.000.000; terlaksanakannya pembangunan jalan rabat beton untuk jalan lingkungan didesa kalirejo kecmtan kebumen 1 Paket RW 5 dan RW 7 desa kalirejo kecmtan kebumen 150.000.000; terlaksanakannya pembangunan					Desa Banyurata Kecmtan Adimulyo ,1 Paket Lapangan Desa Banyurata Kecmtan Adimulyo 50.000.000; terlaksanakannya pembangunan jalan rabat beton untuk jalan lingkungan didesa kalirejo kecmtan kebumen 1 Paket RW 5 dan RW 7 desa kalirejo kecmtan kebumen 150.000.000; terlaksanakannya pembangunan				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		drainase RT 04 RW 02 desa bandung kecmtan kebumen 1 Paket RT 04 RW 02 desa bandung kecmtan kebumen 100.000. 000; terlaksan akannya pembang unan jalan rabat beton RT 01 RW 03 desa tanahsari kecmtan kebumen 1 Paket RT 01 RW 03 desa tanahsari kecmtan kebumen 150.000. 000; terlaksan akannya pembang unan talud jalan samping					drainase RT 04 RW 02 desa bandung kecmtan kebumen 1 Paket RT 04 RW 02 desa bandung kecmtan kebumen 100.000. 000; terlaksan akannya pembang unan jalan rabat beton RT 01 RW 03 desa tanahsari kecmtan kebumen 1 Paket RT 01 RW 03 desa tanahsari kecmtan kebumen 150.000. 000; terlaksan akannya pembang unan talud jalan samping				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		GOR RW 06 desa jemur kecmtan kebumen 1 Paket RW . 06 desa jemur kecmtan kebumen 150.000. 000; Pemeliha raan Jalan Aspal 300 Meter Jl. Tentara Pelajar Gg. Abu Bakar, Gg. Tengah Desa Kawedus an Kec. Kebumen 100.000. 000; Rabat Beton / Jalan 300 Meter RT. 02 / RW. 01 Desa Wonosari Kec. Kebumen 50.000.						GOR RW 06 desa jemur kecmtan kebumen 1 Paket RW . 06 desa jemur kecmtan kebumen 150.000. 000; Pemeliha raan Jalan Aspal 300 Meter Jl. Tentara Pelajar Gg. Abu Bakar, Gg. Tengah Desa Kawedus an Kec. Kebumen 100.000. 000; Rabat Beton / Jalan 300 Meter RT. 02 / RW. 01 Desa Wonosari Kec. Kebumen 50.000.				
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		000; Pembuat an Sumur Bor 1 Paket RT. 09 / RW 03 Desa Gemekse kti - Kec. Kebumen 30.000. 000; Terbangu nnya Rabat beton ruas jalan MTs Al- Hidayah s.d jembatan kaliuter 1 Paket Desa Kralak RW. 06 Kec. Alian 200.000. 000; Terbangu nnya talud jalan dari MTs Al- Hidayah s.d pertigaan Dukuh Gletuk 1 Paket Desa						000; Pembuat an Sumur Bor 1 Paket RT. 09 / RW 03 Desa Gemekse kti - Kec. Kebumen 30.000. 000; Terbangu nnya Rabat beton ruas jalan MTs Al- Hidayah s.d jembatan kaliuter 1 Paket Desa Kralak RW. 06 Kec. Alian 200.000. 000; Terbangu nnya talud jalan dari MTs Al- Hidayah s.d pertigaan Dukuh Gletuk 1 Paket Desa				
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Krakal RT 01 RW 06 Kec. Alian 100.000. 000; Jumlah Paket Bantuan keuangan pembuat an drainase desa 1 Paket RT 02 menuju RT 05 di RW 01 Desa Kalijaya 200.000. 000; Jumlah Paket Bantuan Keuanga n untuk pembang unan Talud Jalan 1 Paket Desa Kambang Sari RT 04 RW 02 200.000. 000; Jumlah paket bantuan					Krakal RT 01 RW 06 Kec. Alian 100.000. 000; Jumlah Paket Bantuan keuan g pembuat an drainase desa 1 Paket RT 02 menuju RT 05 di RW 01 Desa Kalijaya 200.000. 000; Jumlah Paket Bantuan Keuanga n untuk pembang unan Talud Jalan 1 Paket Desa Kambang Sari RT 04 RW 02 200.000. 000; Jumlah paket bantuan				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		keuangan untuk pembangunan Talud 1 Paket RT 01 RW 06 Desa Seliling 200.000.000; Jumlah Paket bantuan keuangan untuk pembangunan Talud 1 Paket RT 04 RW 06 Desa Sawangan 200.000.000; Jumlah Paket bantuan keuangan untuk pembangunan rabat beton jalan 1 Paket Desa Wonokromo RT 09 RW 02					keuangan untuk pembangunan Talud 1 Paket RT 01 RW 06 Desa Seliling 200.000.000; Jumlah Paket bantuan keuangan untuk pembangunan Talud 1 Paket RT 04 RW 06 Desa Sawangan 200.000.000; Jumlah Paket bantuan keuangan untuk pembangunan rabat beton jalan 1 Paket Desa Wonokromo RT 09 RW 02				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		200.000.000; Terbangunnya jembatan dekat masjid nurul huda RT 04 RW 03 1 Paket Desa Pujotirto RT 04 RW 03 Kec. Karangsa mbung					200.000.000; Terbangunnya jembatan dekat masjid nurul huda RT 04 RW 03 1 Paket Desa Pujotirto RT 04 RW 03 Kec. Karangsa mbung				
		90.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk pengaspalan jalan 1 Unit Gang RT 02 RW 03 Desa Bagung Kec Prembun					90.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk pengaspalan jalan 1 Unit Gang RT 02 RW 03 Desa Bagung Kec Prembun				
		150.000.000; terbangunnya lapangan voly rt 02 rw 03 desa prembun					150.000.000; terbangunnya lapangan voly rt 02 rw 03 desa prembun				

		1 Paket Rt 02 Rw 03 Desa Pembun Kec Pembun 20.000. 000; Panjang Jalan Desa yang dibantu pengaspalannya 500 Meter Desa Rowo (Jl. Lingkar Desa RT. 4, RT, 3 dan RT 5 pada RW 1 dan RW 2) 200.000. 000; Panjang Jalan Desa yang dibantu Rehabilitasi/Pembangunan nya 500 Meter Jl. Handaya ni dan Jl. Rahayu						1 Paket Rt 02 Rw 03 Desa Pembun Kec Pembun 20.000. 000; Panjang Jalan Desa yang dibantu pengaspalannya 500 Meter Desa Rowo (Jl. Lingkar Desa RT. 4, RT, 3 dan RT 5 pada RW 1 dan RW 2) 200.000. 000; Panjang Jalan Desa yang dibantu Rehabilitasi/Pembangunan nya 500 Meter Jl. Handaya ni dan Jl. Rahayu					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		RT. 01 dan RT.02 pada RW. 01 Desa Wiromartan 200.000.000; Panjang Jalan Desa yang dibantu 600 Meter Jl. Gang Pesutren RT. 02,03 dan 04 pada RW 03 Desa Wirogaten 200.000.000; Panjang Jalan Desa yang dibantu 500 Meter Jl. Masjid RT 03, 04 pada RW. 02 Desa Wergonayan 200.000.000;					RT. 01 dan RT.02 pada RW. 01 Desa Wiromartan 200.000.000; Panjang Jalan Desa yang dibantu 600 Meter Jl. Gang Pesutren RT. 02,03 dan 04 pada RW 03 Desa Wirogaten 200.000.000; Panjang Jalan Desa yang dibantu 500 Meter Jl. Masjid RT 03, 04 pada RW. 02 Desa Wergonayan 200.000.000;				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Panjang Jalan Desa yang dibantu 500 Meter RT.01, 02 pada RW 01 Desa Singoyudan 200.000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk betonisasi jalan desa 1 Paket RW.01/0 2 Desa Karanggede 300.000.000; Pembangunan Bronjong Drainase Jalan desa pejagatan 1 Kegiatan Desa Pejagatan					Panjang Jalan Desa yang dibantu 500 Meter RT.01, 02 pada RW 01 Desa Singoyudan 200.000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk betonisasi jalan desa 1 Paket RW.01/0 2 Desa Karanggede 300.000.000; Pembangunan Bronjong Drainase Jalan desa pejagatan 1 Kegiatan Desa Pejagatan				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		296.000.000; Terbangunnya Rabat Beton (12 x 3 x 400 m) 1 Paket Desa Pejabat an RT. 02 RW. 02 Kec. Kutowinangun 150.000.000; Terlaksananya Pengurangan dan Pembangunan Lapangan Sepak Bola 1 Paket Desa Karangsari RT. 02 RW. 02 Kec. Kutowinangun 220.000.000; terbangunnya Talud Jalan di						296.000.000; Terbangunnya Rabat Beton (12 x 3 x 400 m) 1 Paket Desa Pejabat an RT. 02 RW. 02 Kec. Kutowinangun 150.000.000; Terlaksananya Pengurangan dan Pembangunan Lapangan Sepak Bola 1 Paket Desa Karangsari RT. 02 RW. 02 Kec. Kutowinangun 220.000.000; terbangunnya Talud Jalan di					
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		Lingkung an RT 03 RW 04 1 Paket RT 03 Desa Babadsar i Kecamat an Kutowina ngun 165.000. 000; terlaksan akannya pengaspa lan jalan Dukuh Japanan RT 01 RW 06 Desa Ungaran Kecamat an Kutowina ngun 1 Paket Dukuh Japanan RT 01 RW 06 Desa Ungaran Kecamat an Kutowina ngun 200.000. 000; Terlaksan anya Pembang					Lingkung an RT 03 RW 04 1 Paket RT 03 Desa Babadsar i Kecamat an Kutowina ngun 165.000. 000; terlaksan akannya pengaspa lan jalan Dukuh Japanan RT 01 RW 06 Desa Ungaran Kecamat an Kutowina ngun 1 Paket Dukuh Japanan RT 01 RW 06 Desa Ungaran Kecamat an Kutowina ngun 200.000. 000; Terlaksan anya Pembang				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		unan Saluran Drainase 1 Paket RW 03 Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun 180.000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk normalisasi jalan desa 1 Paket Jalan Golong jarak Desa Kaibon Petangkuran 400.000.000; Jumlah Paket Bantuan Keuangan untuk Lapangan Desa 1 Paket Desa					unan Saluran Drainase 1 Paket RW 03 Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun 180.000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk normalisasi jalan desa 1 Paket Jalan Golong jarak Desa Kaibon Petangkuran 400.000.000; Jumlah Paket Bantuan Keuangan untuk Lapangan Desa 1 Paket Desa				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Sidomukti 310.000.000; Jumlah Paket bantuan Keuangan untuk Pembangunan Talud Jalan Desa 1 Paket Desa Surobayan 200.000.000; Perbaikan Rabat Beton 100 x 1,6 Meter Bapak Turmudi - Bapak Karmidi RT 1 Rw 3 Dukuh Kinanti Desa Bocor Kec. Buluspesantren 11.000.000; Perbaikan					Sidomukti 310.000.000; Jumlah Paket bantuan Keuangan untuk Pembangunan Talud Jalan Desa 1 Paket Desa Surobayan 200.000.000; Perbaikan Rabat Beton 100 x 1,6 Meter Bapak Turmudi - Bapak Karmidi RT 1 Rw 3 Dukuh Kinanti Desa Bocor Kec. Buluspesantren 11.000.000; Perbaikan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Rabat Beton 200 x 1,6 Meter Menuju Makam Kinanti Dukuh Kinanti Utara RT 1 RW 3 Desa Bocor Kec. Buluspes antren 24.000.000; Perbaikan Rabat Beton 300 x 1,6 Meter Dukuh Ragayuda n RT 2 RW 2 ( 4 Ruas) Desa Bocor Kec Buluspes antren 30.000.000; Pelebaran Jalan Rabat Beton Dari Batas					Rabat Beton 200 x 1,6 Meter Menuju Makam Kinanti Dukuh Kinanti Utara RT 1 RW 3 Desa Bocor Kec. Buluspes antren 24.000.000; Perbaikan Rabat Beton 300 x 1,6 Meter Dukuh Ragayuda n RT 2 RW 2 ( 4 Ruas) Desa Bocor Kec Buluspes antren 30.000.000; Pelebaran Jalan Rabat Beton Dari Batas				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Desa RW 1 600 x 1 x Meter Jl. Desa RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 (RW 1) Desa Maduret no Kec. Buluspes antren 100.000. 000; panjang jalan yg direhabili tasi 400 Meter Jalan Antar Desa (Depan SD Banjarwi nangun Desa Trikarso) 200.000. 000; Jumlah Paket Bantuan Pembuat an Bronjong drainase 2 Paket Brojong Kali Kathing					Desa RW 1 600 x 1 x Meter Jl. Desa RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 (RW 1) Desa Maduret no Kec. Buluspes antren 100.000. 000; panjang jalan yg direhabili tasi 400 Meter Jalan Antar Desa (Depan SD Banjarwi nangun Desa Trikarso) 200.000. 000; Jumlah Paket Bantuan Pembuat an Bronjong drainase 2 Paket Brojong Kali Kathing				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		selatan kantor pos petanahan (100 meter) dan Bronjong Kali Kathing Sebelah timur Rumah Gito Prasetyo (100 meter) 300.000.000; Panjang Jalan Desa yang dibantu pengaspalannya 500 Meter Jalan Menuju SMA Petanahan Desa Karangduwur 200.000.000; Jumlah Paket bantuan keuangan					selatan kantor pos petanahan (100 meter) dan Bronjong Kali Kathing Sebelah timur Rumah Gito Prasetyo (100 meter) 300.000.000; Panjang Jalan Desa yang dibantu pengaspalannya 500 Meter Jalan Menuju SMA Petanahan Desa Karangduwur 200.000.000; Jumlah Paket bantuan keuangan				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		untuk pembang unan lapangan voli 1 Paket Desa Jabres 25.000. 000; Jumlah Paket bantuan keuangan untuk Rabat Beton Jalan Makam 1 Paket Desa Jabres 40.000. 000; Jumlah Paket Bantuan keuangan untuk Pembang unan Talud Jalan Rabat Beton Rt. 01/04 Desa Penusup an 1 Paket Desa						untuk pembang unan lapangan voli 1 Paket Desa Jabres 25.000. 000; Jumlah Paket bantuan keuangan untuk Rabat Beton Jalan Makam 1 Paket Desa Jabres 40.000. 000; Jumlah Paket Bantuan keuangan untuk Pembang unan Talud Jalan Rabat Beton Rt. 01/04 Desa Penusup an 1 Paket Desa					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Penusup an 100.000. 000; Jumlah Paket Bantuan keuangan untuk Pembang unan Talud Jalan 1 Paket Talud Rt. 01/02 Desa Penusup an 50.000. 000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pembang unan Talud Jalan Rabat beton 1 Paket Rt. 02/02 Desa Donosari 100.000. 000; Jumlah paket bantuan						Penusup an 100.000. 000; Jumlah Paket Bantuan keuangan untuk Pembang unan Talud Jalan 1 Paket Talud Rt. 01/02 Desa Penusup an 50.000. 000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pembang unan Talud Jalan Rabat beton 1 Paket Rt. 02/02 Desa Donosari 100.000. 000; Jumlah paket bantuan					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		keuangan untuk Pembangunan Talud Jalan 1 Paket RW. 03 Desa Donosari 50.000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pengerasan jalan desa 1 Paket Rw. 06 Desa Sidoa gung 40.000.000; Pengaspalan jalan Desa 1 Paket RT 01 - RT 03 RW 01 Desa Karang Kemiri 40.000.000; Tiang Lampu Penerang					keuangan untuk Pembangunan Talud Jalan 1 Paket RW. 03 Desa Donosari 50.000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pengerasan jalan desa 1 Paket Rw. 06 Desa Sidoa gung 40.000.000; Pengaspalan jalan Desa 1 Paket RT 01 - RT 03 RW 01 Desa Karang Kemiri 40.000.000; Tiang Lampu Penerang				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		an jalan desa 6 Lokasi RT 01/03 dan RT 03/03 Desa Karang Kemiri 4.500. 000; Terlaksan aanya Pengaspa lan Jalan Lingkung an Rt 04 Rw 06 Keluraha n Karangan yar 1 Paket Keluraha n Karangan yar RT 04 RW 06 Keluraha n Karangan yar Kecamat an Karangan yar 85.000. 000; Terbangu nnya Talud						an jalan desa 6 Lokasi RT 01/03 dan RT 03/03 Desa Karang Kemiri 4.500. 000; Terlaksan aanya Pengaspa lan Jalan Lingkung an Rt 04 Rw 06 Keluraha n Karangan yar 1 Paket Keluraha n Karangan yar RT 04 RW 06 Keluraha n Karangan yar Kecamat an Karangan yar 85.000. 000; Terbangu nnya Talud					
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		Jalan Desa Blok Watu Rupit Rt 06 Rw 01 Desa Giripurno Kecamat an Karangan yar 1 Paket Desa Giripurno Rt 06 Rw 01 Kecamat an Karangny ar 100.000. 000; Betonisa si Jalan di Dukuh Kalikumb ang Rt 01 Rw 04 1 Paket Desa Kalipoh Rt 00 Rw 04 Kecmata n Ayah 135.000. 000; Pembang unan Jalan					Jalan Desa Blok Watu Rupit Rt 06 Rw 01 Desa Giripurno Kecamat an Karangan yar 1 Paket Desa Giripurno Rt 06 Rw 01 Kecamat an Karangny ar 100.000. 000; Betonisa si Jalan di Dukuh Kalikumb ang Rt 01 Rw 04 1 Paket Desa Kalipoh Rt 00 Rw 04 Kecmata n Ayah 135.000. 000; Pembang unan Jalan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Desa 50 Meter Rt 05 Rw 07 Desa Wonore jo Kecamat an Karang anyar 10.000. 000; Pengecor an Jalan Desa Srengsre ng 10 Meter rt 01 rw 05 (srengsen g) desa wonorejo kecama tan karangan yar5.000. 000; Bantuan Keuanga n untuk Perbaika n Jalan Desa (Amblas) 1 Paket Rt 04 Rw 03 Desa Wonore jo Kecamat an					Desa 50 Meter Rt 05 Rw 07 Desa Wonore jo Kecamat an Karang anyar 10.000. 000; Pengecor an Jalan Desa Srengsre ng 10 Meter rt 01 rw 05 (srengsen g) desa wonorejo kecama tan karangan yar5.000. 000; Bantuan Keuanga n untuk Perbaika n Jalan Desa (Amblas) 1 Paket Rt 04 Rw 03 Desa Wonore jo Kecamat an				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Karang anyar 8.000. 000; Rabat Beton Jalan Lingkung an 70 Meter Rt 03 Rw 02 Desa Wo norejo Kecamat an Karangan yar 10.000. 000; Rabat Beton Jalan Lingkung an 100 Meter Rt 03 Rw 06 Desa Wonore jo, Kecamat an Karangan yar 10.000. 000; Pembuat an Jalan Berundak 70 Meter Rw 04 Desa Wo					Karang anyar 8.000. 000; Rabat Beton Jalan Lingkung an 70 Meter Rt 03 Rw 02 Desa Wo norejo Kecamat an Karangan yar 10.000. 000; Rabat Beton Jalan Lingkung an 100 Meter Rt 03 Rw 06 Desa Wonore jo, Kecamat an Karangan yar 10.000. 000; Pembuat an Jalan Berundak 70 Meter Rw 04 Desa Wo				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		norejo Kecamat an Karangan yar 15.000. 000; Jumlah Paket Bantuan keuangan untuk rabat beton jalan desa DESA GRENGG ENG KECAMA TAN KARANG ANYAR 150.000. 000; Jumlah Paket Bantuan Keuanga n Untuk Pembang unan Lapangan Desa 1 Paket Lapangan Desa Gunungs ari Karangga yam					norejo Kecamat an Karangan yar 15.000. 000; Jumlah Paket Bantuan keuangan untuk rabat beton jalan desa DESA GRENGG ENG KECAMA TAN KARANG ANYAR 150.000. 000; Jumlah Paket Bantuan Keuanga n Untuk Pembang unan Lapangan Desa 1 Paket Lapangan Desa Gunungs ari Karangga yam				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		250.000.000; Pembangunan Pesanggrahan Makam 1 Paket Tempat Pemakaman Gede Dk Purwoda di Desa Karanggayam 25.000.000; Pengaspalan Jalan Desa 1 Lokasi Dk.kali wuluh RT 01 s.d RT 03 RW 01 Desa Karanggayam 121.000.000; Jumlah bantuan Rabat Beton 1 Paket RT 01 RW 04 Dk KaliTerus Desa Karangga					250.000.000; Pembangunan Pesanggrahan Makam 1 Paket Tempat Pemakaman Gede Dk Purwoda di Desa Karanggayam 25.000.000; Pengaspalan Jalan Desa 1 Lokasi Dk.kali wuluh RT 01 s.d RT 03 RW 01 Desa Karanggayam 121.000.000; Jumlah bantuan Rabat Beton 1 Paket RT 01 RW 04 Dk KaliTerus Desa Karangga				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		yam 25.000. 000; Tiang Penerang an Jalan Desa 100 Lokasi Desa Karangga yam 75. 000.000; Jumlah Ruas Jalan Desa yang dibantu pembang unannya 1 Ruas Dukuh Plipitan- Tedunan Desa Giritirto 200.000. 000; jumlah Bantuan Rabat Beton jalan Lingkung an 1 Paket RT 05 dan RT 06 RW 02 Desa Karangga yam						yam 25.000. 000; Tiang Penerang an Jalan Desa 100 Lokasi Desa Karangga yam 75. 000.000; Jumlah Ruas Jalan Desa yang dibantu pembang unannya 1 Ruas Dukuh Plipitan- Tedunan Desa Giritirto 200.000. 000; jumlah Bantuan Rabat Beton jalan Lingkung an 1 Paket RT 05 dan RT 06 RW 02 Desa Karangga yam					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		15.000.000; Jumlah bantuan Pengaspalan jalan lingkungan 1 Paket RT 07 RW 02 Desa Karanggayam					15.000.000; Jumlah bantuan Pengaspalan jalan lingkungan 1 Paket RT 07 RW 02 Desa Karanggayam				
		45.000.000; Jumlah Bantuan Rabat Beton 1 Paket RT 03 RW 05 Desa Kajoran					45.000.000; Jumlah Bantuan Rabat Beton 1 Paket RT 03 RW 05 Desa Kajoran				
		15.000.000; Jumlah Bantuan Rabat Beton 1 Lokasi Desa Kajoran RT 03 RW 07 Dk Condong					15.000.000; Jumlah Bantuan Rabat Beton 1 Lokasi Desa Kajoran RT 03 RW 07 Dk Condong				
		15.000.000; Terlaksananya Pembangunan Rabat					15.000.000; Terlaksananya Pembangunan Rabat				

		Beton 1 Paket Desa Kajoran RT 03 Rw 02 Dk sudagara n15.000. 000 RABAT BETON Jalan Desa RT 03 RW 01 DUKUH KEMOJIN G DESA KAJORAN KECAMA TAN KARANG GAYAM 100.000. 000; Jumlah Paket Bantuan Keuanga n Untuk Betonosa si Jalan Desa 1 Paket RT. 03 dan RT 04 Desa Wonotir to Karangga yam 250.000.						Beton 1 Paket Desa Kajoran RT 03 Rw 02 Dk sudagara n15.000. 000 RABAT BETON Jalan Desa RT 03 RW 01 DUKUH KEMOJIN G DESA KAJORAN KECAMA TAN KARANG GAYAM 100.000. 000; Jumlah Paket Bantuan Keuanga n Untuk Betonosa si Jalan Desa 1 Paket RT. 03 dan RT 04 Desa Wonotir to Karangga yam 250.000.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		000; "Bantuan keuangan ruas jalan lokidang plipitan Desa Giritirto Bantuan keuangan ruas jalan Kaliputih RT 05 RW 01 Desa Clapar (200 m) Bantuan keuangan ruas jalan Krajan Sijo Desa Kalirejo "3 Kecamat an Karangga yam 450.000. 000; Pengaspa lan poros jalan desa sidomuk ti - pekuwon 1 Paket Desa Sidomuk ti Kec. Adimulyo						000; "Bantuan keuangan ruas jalan lokidang plipitan Desa Giritirto Bantuan keuangan ruas jalan Kaliputih RT 05 RW 01 Desa Clapar (200 m) Bantuan keuangan ruas jalan Krajan Sijo Desa Kalirejo "3 Kecamat an Karangga yam 450.000. 000; Pengaspa lan poros jalan desa sidomuk ti - pekuwon 1 Paket Desa Sidomuk ti Kec. Adimulyo				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		150.000.000; Peaspalan poros jalan Desa Sekarteja – Bonjok 1 Paket Desa Sekarteja Kec. Adimulyo 150.000.000; Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa 1 Paket Desa Tegalsari Kec. Adimulyo 75.000.000; Pengaspalan Jalan Desa 1 Paket Desa Sawangan Kec. Kuwarasan 100.000.000; Pengaspalan Poros					150.000.000; Peaspalan poros jalan Desa Sekarteja – Bonjok 1 Paket Desa Sekarteja Kec. Adimulyo 150.000.000; Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa 1 Paket Desa Tegalsari Kec. Adimulyo 75.000.000; Pengaspalan Jalan Desa 1 Paket Desa Sawangan Kec. Kuwarasan 100.000.000; Pengaspalan Poros				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Jalan Desa Serut – Bendung an 1 Paket Desa Serut Kec.Kuwa rasan150 .000.000; Pembang unan Rabat Beton Jalan Desa 1 Paket Desa Sidomukt i Kec. Kuwarasa n150.000 .000; Terbangu nnya lapangan desa 1 Paket Desa Pondokg ebangsari kecamata nkuwaras an250.00 0.000; terlaksan anya pengaspa lan jalan perbatas					Jalan Desa Serut – Bendung an 1 Paket Desa Serut Kec.Kuwa rasan150 .000.000; Pembang unan Rabat Beton Jalan Desa 1 Paket Desa Sidomukt i Kec. Kuwarasa n150.000 .000; Terbangu nnya lapangan desa 1 Paket Desa Pondokg ebangsari kecamata nkuwaras an250.00 0.000; terlaksan anya pengaspa lan jalan perbatas				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		an desa lemahdu wur menuju desa harjodow o 1 Paket Desa Lemahdu wur Kecamat an Kuarasa n250.000 .000; terlaksan anya pengaspa lan jalan perbatas an desa harjodow o menuju desa lemahdu wur 1 Paket desa harjodo wo kecamata n kuwarasa n200.000 .000; Jumlah Paket Bantuan Keuanga n untuk pengeras					an desa lemahdu wur menuju desa harjodow o 1 Paket Desa Lemahdu wur Kecamat an Kuarasa n250.000 .000; terlaksan anya pengaspa lan jalan perbatas an desa harjodow o menuju desa lemahdu wur 1 Paket desa harjodo wo kecamata n kuwarasa n200.000 .000; Jumlah Paket Bantuan Keuanga n untuk pengeras				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		an Jalan Desa 1 Paket RT.03 RW. 01 Desa Kuwaru 60.000. 000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pengeras an jalan 1 Paket RT. 01 RW. 01 Dukuh Guyanga n Desa Madure so 40.000. 000; Terbangu nnya Talud Jalan Desa di Desa Sidoharjo Kec. Puring 1 Paket Desa Sidoharjo Kec. Puring 100.000. 000;						an Jalan Desa 1 Paket RT.03 RW. 01 Desa Kuwaru 60.000. 000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pengeras an jalan 1 Paket RT. 01 RW. 01 Dukuh Guyanga n Desa Madure so 40.000. 000; Terbangu nnya Talud Jalan Desa di Desa Sidoharjo Kec. Puring 1 Paket Desa Sidoharjo Kec. Puring 100.000. 000;					
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		Terbangunnya Talud Jalan Desa di Desa Tambak mulyo Kec. Puring 1 Paket Desa Tambak mulyo Kec. Puring 150.000. 000; Terbangunnya Talud Jalan Desa di Desa Kedalem an Wetan Kec. Puring 1 Paket Desa Kedalem an Wetan Kec. Puring 150.000. 000; Terbangunnya Talud Jalan Desa di					Terbangunnya Talud Jalan Desa di Desa Tambak mulyo Kec. Puring 1 Paket Desa Tambak mulyo Kec. Puring 150.000. 000; Terbangunnya Talud Jalan Desa di Desa Kedalem an Wetan Kec. Puring 1 Paket Desa Kedalem an Wetan Kec. Puring 150.000. 000; Terbangunnya Talud Jalan Desa di				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Desa Weton Kulon Kec. Puring 1 Paket Desa Weton Kulon Kec. Puring 100.000. 000; Terbangu nnya Talud Jalan Desa di Desa Banjarejo Kec. Puring 1 Paket Desa Banjarejo Kec. Puring 100.000. 000; Terbangu nnya Talud Jalan Desa di Desa Setiadi Kec. Puring 1 Paket Desa Setiadi					Desa Weton Kulon Kec. Puring 1 Paket Desa Weton Kulon Kec. Puring 100.000. 000; Terbangu nnya Talud Jalan Desa di Desa Banjarejo Kec. Puring 1 Paket Desa Banjarejo Kec. Puring 100.000. 000; Terbangu nnya Talud Jalan Desa di Desa Setiadi Kec. Puring 1 Paket Desa Setiadi				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Kec. Puring 75.000. 000; Terbangu nnya Talud Jalan Desa di Desa Madureja Kec. Puring 1 Paket Desa Madureja Kec. Puring75. 000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pembang unan talud jalan desa 1 Paket Desa Surorejan Kec. Puring 150.000. 000; Terbangu nnya talud jalan desa di						Kec. Puring 75.000. 000; Terbangu nnya Talud Jalan Desa di Desa Madureja Kec. Puring 1 Paket Desa Madureja Kec. Puring75. 000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pembang unan talud jalan desa 1 Paket Desa Surorejan Kec. Puring 150.000. 000; Terbangu nnya talud jalan desa di					
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		desa sudoharjo kecamatan puring 1 paket desa sidoharjo kecamatan puring 100.000.000; Terlaksananya Pengurangan Lapangan Desa 1 Paket Desa Klopogodo Kcamatan Gombong 100.000.000; Terlaksananya Rabat Beton Jalan Desa di Lingkungan Rt 02 Rw 04 Desa Wonosigro 1 Paket Desa Wonosigro RT 02					desa sudoharjo kecamatan puring 1 paket desa sidoharjo kecamatan puring 100.000.000; Terlaksananya Pengurangan Lapangan Desa 1 Paket Desa Klopogodo Kcamatan Gombong 100.000.000; Terlaksananya Rabat Beton Jalan Desa di Lingkungan Rt 02 Rw 04 Desa Wonosigro 1 Paket Desa Wonosigro RT 02				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Rw 04 Kecamat an Gombon g100.000 .000; Terlaksan anya Rabat Beton Jalan Desa di Lingkung an RW 03 1 Paket Desa Wero RW 03 Kecamat an Gombon g 100.000. 000; Terlaksan anya pembang uanan Rabat beton dan Drainase  1 Paket RT 04 Dan RT 05 RW 03 Desa Kedung Puji 15.000.0						Rw 04 Kecamat an Gombon g100.000 .000; Terlaksan anya Rabat Beton Jalan Desa di Lingkung an RW 03 1 Paket Desa Wero RW 03 Kecamat an Gombon g 100.000. 000; Terlaksan anya pembang uanan Rabat beton dan Drainase  1 Paket RT 04 Dan RT 05 RW 03 Desa Kedung Puji 15.000.0					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		00; Jumlah paket bantuan keuangan untuk cor beton jalan 1 Paket Jalan RW. 3 Desa Sidayu 100.000. 000; Pembang unan Talud Jalan Desa 1 Paket Dukuh Kewunen RT 03 RW 03 Desa Sikayu 100.000. 000; Terbangu nnya Pembang unan Talud Jalan Desa (100 x 2 x 0,4 m) 1 Paket Dukuh Kalirong RT 3 RW 2 Desa					00; Jumlah paket bantuan keuangan untuk cor beton jalan 1 Paket Jalan RW. 3 Desa Sidayu 100.000. 000; Pembang unan Talud Jalan Desa 1 Paket Dukuh Kewunen RT 03 RW 03 Desa Sikayu 100.000. 000; Terbangu nnya Pembang unan Talud Jalan Desa (100 x 2 x 0,4 m) 1 Paket Dukuh Kalirong RT 3 RW 2 Desa				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Rogodono Kec Buayan 70.000.000; Terbangunnya Pembangunan Pagar Makam 60 Meter Dukuh Jero Tengah RT 2 RW 3 Desa Rogodono Kec Buayan 30.000.000; Peningkatan Akses Jalan Desa (350 x 2,5 x 0,15 m) 1 Paket Dukuh Pesarehan RT 5 RW 5 Desa Ngoraji Kec Buayan 150.000.000; terbangu					Rogodono Kec Buayan 70.000.000; Terbangunnya Pembangunan Pagar Makam 60 Meter Dukuh Jero Tengah RT 2 RW 3 Desa Rogodono Kec Buayan 30.000.000; Peningkatan Akses Jalan Desa (350 x 2,5 x 0,15 m) 1 Paket Dukuh Pesarehan RT 5 RW 5 Desa Ngoraji Kec Buayan 150.000.000; terbangu				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		nnya jalan penghub ung RT 1 RW 2 dan RT 3 RW 5 Desa Mergoso no Kec. Buayan 1 Paket Desa Mergoso no Kec. Buayan 150.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan jalan poros desa 1 Km Desa karangbo long kec buayan kebumen 150.000. 000; Pembang unan Makada m Jalan Desa (450 x 2,5 x 0,15 m)1					nnya jalan penghub ung RT 1 RW 2 dan RT 3 RW 5 Desa Mergoso no Kec. Buayan 1 Paket Desa Mergoso no Kec. Buayan 150.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan jalan poros desa 1 Km Desa karangbo long kec buayan kebumen 150.000. 000; Pembang unan Makada m Jalan Desa (450 x 2,5 x 0,15 m)1				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Paket Dukuh Lemungs ur Rt 02 Rw 08 Desa Wonohar jo Kcamatn Rowoke le 54.700.0 00; Pembang unan Rabat Beton jalan Desa (125 x 2,4 x0,12 m) 1 Paket Dukuh Lemungs ur Rt 01 Rw 08 Desa Wonohar jo Kcamata n Rowokel e33.100. 000; Pembang unan Talud Tlasah pengama n						Paket Dukuh Lemungs ur Rt 02 Rw 08 Desa Wonohar jo Kcamatn Rowoke le 54.700.0 00; Pembang unan Rabat Beton jalan Desa (125 x 2,4 x0,12 m) 1 Paket Dukuh Lemungs ur Rt 01 Rw 08 Desa Wonohar jo Kcamata n Rowokel e33.100. 000; Pembang unan Talud Tlasah pengama n					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Jembatan Desa 22,95 m3 Dukuh Wonosari Rt 01 Rw 07 Desa Wonohar jo Kecamat an Rowokel e 22.200.0 00; Pembang unan Penamba han lebar Jalan Desa (20 x 1,5 x 0,12 x 5 m)1 Paket Dukuh Luwung Rt 01 Rw 02 Desa Wonohar jo Kecamat an Rowokel e60.000. 000; jumlah paket Jalan Rabat Beton					Jembatan Desa 22,95 m3 Dukuh Wonosari Rt 01 Rw 07 Desa Wonohar jo Kecamat an Rowokel e 22.200.0 00; Pembang unan Penamba han lebar Jalan Desa (20 x 1,5 x 0,12 x 5 m)1 Paket Dukuh Luwung Rt 01 Rw 02 Desa Wonohar jo Kecamat an Rowokel e60.000. 000; jumlah paket Jalan Rabat Beton				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		dan Talud Desa 2 Paket Dusun Karangse mbung RT. 02/04 Desa Kretek 150.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan jalan poros desa 1 Km Desa pasir kec ayah kebumen 150.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan jalan poros desa 1 Paket Desa jintung kec ayah kebumen					dan Talud Desa 2 Paket Dusun Karangse mbung RT. 02/04 Desa Kretek 150.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan jalan poros desa 1 Km Desa pasir kec ayah kebumen 150.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan jalan poros desa 1 Paket Desa jintung kec ayah kebumen				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		150.000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pembangunan saluran drainase jalan desa 1 Paket Desa Demangari 200.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembangunan jalan poros desa 1 Paket Desa srati kecamatan ayah kebumen 150.000.000; Pengaspalan Jalan 1 Paket Dukuh Kayuares RT 01 RW					150.000.000; Jumlah paket bantuan keuangan untuk pembangunan saluran drainase jalan desa 1 Paket Desa Demangari 200.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembangunan jalan poros desa 1 Paket Desa srati kecamatan ayah kebumen 150.000.000; Pengaspalan Jalan 1 Paket Dukuh Kayuares RT 01 RW				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		04 Desa Soka Kecamatan Poncowarno 200.000.000; terlaksanakannya pembangunan talud jalan RT 01 menuju RT 02/RW04 desa sendangdalem kecamatan padureso 1 Paket dukuh kalikendi RW 4 Desa Sendang dalem kecamatan padureso 100.000.000; Tergabungnya drainase jalan Duku					04 Desa Soka Kecamatan Poncowarno 200.000.000; terlaksanakannya pembangunan talud jalan RT 01 menuju RT 02/RW04 desa sendangdalem kecamatan padureso 1 Paket dukuh kalikendi RW 4 Desa Sendang dalem kecamatan padureso 100.000.000; Tergabungnya drainase jalan Duku				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Kwaron RT 01 RW 03 Desa Blater Kecamat an Poncowa rno 1 Paket Dukuh Kwaron RT 01 RW 03 Desa Blater Kecamat an Poncowa rno 200.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan jalan poros desa 1 Paket Desa Banjararj o Dukuh Gendon Sampai Lemahab ang 400.000. 000; Pembang unan						Kwaron RT 01 RW 03 Desa Blater Kecamat an Poncowa rno 1 Paket Dukuh Kwaron RT 01 RW 03 Desa Blater Kecamat an Poncowa rno 200.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan jalan poros desa 1 Paket Desa Banjararj o Dukuh Gendon Sampai Lemahab ang 400.000. 000; Pembang unan					
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		Jalan 1 Ruas Dukuh Gombong Desa Plumbon 159.000.000; Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa 250 Meter Desa Karangduwur RT 01 RW 03, Kec. Ayah, Kab. Kebumen 100.000.000; Pengaspalan Jalan Menuju Wisata Bulupitu 2 Km Desa Kaliputih Kecamatan Kutowiningun 500.000.000; rehab jalan 500					Jalan 1 Ruas Dukuh Gombong Desa Plumbon 159.000.000; Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa 250 Meter Desa Karangduwur RT 01 RW 03, Kec. Ayah, Kab. Kebumen 100.000.000; Pengaspalan Jalan Menuju Wisata Bulupitu 2 Km Desa Kaliputih Kecamatan Kutowiningun 500.000.000; rehab jalan 500				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Meter Rt 1 Rw 5 dukuh Pesawah an Desa Plumbon 159.000. 000; Panjang Talud penahan badan jalan penghub ung desa wonoharj o dengan desa wagirpan dan (RT 001 RW 003) 500 Meter Talud penahan badan jalan penghub ung desa wonoharj o dengan desa wagirpan dan (RT 001 RW 003) 109.000. 000; Jumlah bantuan keuangan					Meter Rt 1 Rw 5 dukuh Pesawah an Desa Plumbon 159.000. 000; Panjang Talud penahan badan jalan penghub ung desa wonoharj o dengan desa wagirpan dan (RT 001 RW 003) 500 Meter Talud penahan badan jalan penghub ung desa wonoharj o dengan desa wagirpan dan (RT 001 RW 003) 109.000. 000; Jumlah bantuan keuangan				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		untuk drainase 1000 Paket RT 05 RW 02 Desa Gemekse kti30.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan 100 Paket RT 05 RW 04 Desa Muktisari 40.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan desa 1 Paket RT 03,04,05 RW 02 Desa Gemekse kti 120.000.000; Jumlah bantuan keuangan					untuk drainase 1000 Paket RT 05 RW 02 Desa Gemekse kti30.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan 100 Paket RT 05 RW 04 Desa Muktisari 40.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan desa 1 Paket RT 03,04,05 RW 02 Desa Gemekse kti 120.000.000; Jumlah bantuan keuangan				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		untuk pengaspalan jalan 1 Paket RT 03,04,05 RW 02 Desa Gemeksekti80.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan 1 Paket RT 07 RW 03 Desa Gemeksekti70.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan					untuk pengaspalan jalan 1 Paket RT 03,04,05 RW 02 Desa Gemeksekti80.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan 1 Paket RT 07 RW 03 Desa Gemeksekti70.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan				
		1 Paket RT 09 RW 03 Desa Gemeksekti55.000.000; Jumlah bantuan keuangan					1 Paket RT 09 RW 03 Desa Gemeksekti55.000.000; Jumlah bantuan keuangan				

		untuk drainase 1 Paket RT 05 RW 04 Desa Muktisari 50.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan 1 Paket RT 01 RW 03 Desa Gemeksekti 40.000.000; Jumlah bantuan keuangan talud jalan 1 Paket RT 02 RW 03 Desa Gemeksekti 50.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk pemeliharaan jalan 1					untuk drainase 1 Paket RT 05 RW 04 Desa Muktisari 50.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk rabat beton jalan 1 Paket RT 01 RW 03 Desa Gemeksekti 40.000.000; Jumlah bantuan keuangan talud jalan 1 Paket RT 02 RW 03 Desa Gemeksekti 50.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk pemeliharaan jalan 1				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Paket RT 01 RW 02 Desa Jatimulyo Kec.Alian (panjang 350 m x 3 m) 200.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pemeliha raan jalan 1 Paket RT 01 RW 01 Desa Jatimulyo Kec.Alian (panjang 175 m x 3 m) 195.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pemeliha raan jalan 1 Paket RT 04 RW 01 Desa Jatimulyo Kec.Alian (panjang 154)					Paket RT 01 RW 02 Desa Jatimulyo Kec.Alian (panjang 350 m x 3 m) 200.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pemeliha raan jalan 1 Paket RT 01 RW 01 Desa Jatimulyo Kec.Alian (panjang 175 m x 3 m) 195.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pemeliha raan jalan 1 Paket RT 04 RW 01 Desa Jatimulyo Kec.Alian (panjang 154)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		45.500.000; Terbangunya pengaspalan jalan lingkungan RT 03 RW 01 1 Paket Desa Sangubanyu RT 03 RW 01 Kecamatan Buluspesantren 250.000.000; Terbangunya pengaspalan jalan lingkungan RT 04 RW 02 1 Paket Desa Sangubanyu RT 04 RW 02 Kecamatan Buluspesantren75.000.000; Terbangunnya talud jalan					45.500.000; Terbangunya pengaspalan jalan lingkungan RT 03 RW 01 1 Paket Desa Sangubanyu RT 03 RW 01 Kecamatan Buluspesantren 250.000.000; Terbangunya pengaspalan jalan lingkungan RT 04 RW 02 1 Paket Desa Sangubanyu RT 04 RW 02 Kecamatan Buluspesantren75.000.000; Terbangunnya talud jalan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		usaha tani RT 03 RW 02 1 Paket Desa Sanguba nyu RT 03 RW 02 Kecamat an Buluspes antren 290.000. 000; Terbangu nnya pengaspa lan jalan lingkunga n RT 05 RW 02 1 Paket Desa Sanguba nyu RT 05 RW 02 Kecamat an Buluspes antren85 .000.000; Terbangu nnya pengaspl aan jalan lingkunga n RT 04 RW 03 1 Paket Desa Sanguba					usaha tani RT 03 RW 02 1 Paket Desa Sanguba nyu RT 03 RW 02 Kecamat an Buluspes antren 290.000. 000; Terbangu nnya pengaspa lan jalan lingkunga n RT 05 RW 02 1 Paket Desa Sanguba nyu RT 05 RW 02 Kecamat an Buluspes antren85 .000.000; Terbangu nnya pengaspl aan jalan lingkunga n RT 04 RW 03 1 Paket Desa Sanguba				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		nyu RT 04 RW 03 Kecamat an Buluspes antren 100.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk lapangan desa 1 Paket Desa Kritik Kec.Peta nahan 450.000. 000; Pembang unan Talud Jalan Makam Jong Kemureb Desa Sidomuly o  200 Meter Makam Jong Kemureb Di Jalan Raya Kemit Karangan						nyu RT 04 RW 03 Kecamat an Buluspes antren 100.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk lapangan desa 1 Paket Desa Kritik Kec.Peta nahan 450.000. 000; Pembang unan Talud Jalan Makam Jong Kemureb Desa Sidomuly o  200 Meter Makam Jong Kemureb Di Jalan Raya Kemit Karangan					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		yar 150.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan rabat beton jalan desa 1 Desa Karangke miri Kec. Karangan yar 189.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan drainase Kawasan Pemukim an 1 Paket  Desa Jatimulyo Kec. Kuwarasa n 140.000. 000; Jumlah bantuan						yar 150.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan rabat beton jalan desa 1 Desa Karangke miri Kec. Karangan yar 189.000. 000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembang unan drainase Kawasan Pemukim an 1 Paket  Desa Jatimulyo Kec. Kuwarasa n 140.000. 000; Jumlah bantuan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		keungan untuk pembangunan drainase 1 Paket Desa Serut Rw 01 Rt 02 Kec Kuwarasan55.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembangunan talud jalan 1 Paket RT 02 RW 04 Desa Semanding Kec.Gombong 100.000.000; Terbangunnya jalan pertanian dari prupuk s/d sawah blok banyak 1 Paket					keungan untuk pembangunan drainase 1 Paket Desa Serut Rw 01 Rt 02 Kec Kuwarasan55.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk pembangunan talud jalan 1 Paket RT 02 RW 04 Desa Semanding Kec.Gombong 100.000.000; Terbangunnya jalan pertanian dari prupuk s/d sawah blok banyak 1 Paket				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Desa Tirtomoyo RW 04 Kec. Poncowarno 100.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk drainase 1 paket Lokasi di saluran Sundut Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo Rp. 200.000.000; Pelebaran jalan aspal desa 1 Paket di Desa Jatimalang RT 04 dan RT 05 RW 03 Kecamatan Klirong Rp. 200.000.000;					Desa Tirtomoyo RW 04 Kec. Poncowarno 100.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk drainase 1 paket Lokasi di saluran Sundut Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo Rp. 200.000.000; Pelebaran jalan aspal desa 1 Paket di Desa Jatimalang RT 04 dan RT 05 RW 03 Kecamatan Klirong Rp. 200.000.000;				
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		Pelebaran jalan aspal desa 1 paket lokasi Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong Rp. 200.000.000; Pelebaran jalan aspal desa 1 paket Desa Panjangsari Kecamatan Gombong Rp. 200.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk drainase 1 paket Desa Kabekelan Rp. 250.000.000.					Pelebaran jalan aspal desa 1 paket lokasi Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong Rp. 200.000.000; Pelebaran jalan aspal desa 1 paket Desa Panjangsari Kecamatan Gombong Rp. 200.000.000; Jumlah bantuan keuangan untuk drainase 1 paket Desa Kabekelan Rp. 250.000.000.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Capaian SKPD Tertib Administrasi Aset Tepat Waktu</b>	<b>83%</b>	<b>695.334.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Capaian SKPD Tertib Administrasi Aset Tepat Waktu</b>	<b>83%</b>	<b>1.867.460.000</b>
V.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah dan Terlaksananya Proses Pengamanan, Pemanfaatan dan Peminadatangan Barang Milik Daerah	3 Dokumen 3 Kegiatan	695.334.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah dan Terlaksananya Proses Pengamanan, Pemanfaatan dan Peminadatangan Barang Milik Daerah	3 Dokumen 3 Kegiatan	1.867.460.000
16	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	312.518.000	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	498.526.000
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	
17	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Miik Daerah	BPKAD	Jumlah plang papan nama Barang Milik Daerah yang terpasang	100 buah	228.869.000	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Miik Daerah	BPKAD	Jumlah plang papan nama Barang Milik Daerah yang terpasang	100 buah	439.230.000
			Jumlah patok tanah Barang Milik Daerah yang terpasang	200 buah				Jumlah patok tanah Barang Milik Daerah yang terpasang	200 buah	

			Jumlah unit kendaraan dinas Milik Daerah yang diasuransikan	5 unit				Jumlah unit kendaraan dinas Milik Daerah yang diasuransikan	5 unit		
18	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Miik Daerah	BPKAD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pemindahtangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 kegiatan	153.947.000	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Miik Daerah	BPKAD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pemindahtangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 kegiatan	929.704.000	
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	BPKAD	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	15%	46.150.507.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	BPKAD	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	15%	3.375.260.000	
			Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	15%				Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	15%		
			Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	159 Dokumen				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	159 Dokumen		
VI.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	BPKAD	Persentase Dokumen	100%	57.597.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	BPKAD	Persentase Dokumen	100%	56.175.000	

	Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun			Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun			
19	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.500.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.000.000	
20	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	27.097.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.175.000	
VII	Administrasi Keuangan	BPKAD	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	36.781.010.000	Administrasi Keuangan	BPKAD	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	198.875.000	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	55 Orang	36.380.010.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	55 Orang	0	
			Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil PNS	55 Orang				Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil PNS	55 Orang		
22	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Kegiatan Penunjang Tugas ASN	2 Kegiatan	40.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Kegiatan Penunjang Tugas ASN	2 Kegiatan	23.425.000	
23	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	BPKAD	Jumlah dokumen data penatausahaan	12 Dokumen	211.000.000	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	BPKAD	Jumlah dokumen data penatausahaan	12 Dokumen	175.450.000	

			keuangan SKPD					keuangan SKPD			
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja keuangan yang disusun	26 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja keuangan yang disusun	26 Dokumen	0	
VIII	<b>Administrasi Umum</b>	BPKAD	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	9.248.900.000	<b>Administrasi Umum</b>	BPKAD	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	3.053.660.000	
25	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12 Bulan	2.100.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD	Terkelolanya surat menyurat	12 Bulan	7.687.000	
26	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan telekomunikasi air dan listrik	12 Bulan	200.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	585.640.000	
27	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah bulan perawatan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	70.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	331.619.000	
28	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan jasa pengelola kegiatan	13 Orang	113.803.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	13 Orang	512.435.000	
29	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	80.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKAD	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	21.962.000	
			Jumlah petugas kebersihan kantor	5 Orang					5 Orang		

30	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	28.000.000	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	BPKAD	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	114.200.000	
31	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	42.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	109.808.000	
32	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan penggandaan cetakan dan penjilidan	12 Bulan	29.347.000	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	12 Bulan	109.808.000	
33	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	6.300.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	21.962.000	
34	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	6.300.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	21.962.000	
35	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan jamuan rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	87.500.000	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	175.692.000	
36	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	55 Orang/ kali	50.050.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	55 Orang/ kali	219.615.000	
37	Pengadaan	BPKAD	Jumlah	449 unit	8.306.500.000	Pengadaan	BPKAD	Pengadaan	449 unit	60.000.000	

	Kendaraan dinas/ Operasional		Pengadaan kendaraan dinas/operasio nal			Kendaraan dinas/ Operasional		Paket kendaraan dinas/operasio nal			
38	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Pengadaan paket perlengkapan kantor	1 Unit	199.650.000	
39	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPKAD	Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	1 Unit	100.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPKAD	Pengadaan Paket peralatan gedung kantor	1 Unit	400.000.000	
40	Pengadaan mebeleur	BPKAD	Jumlah penyediaan mebeleur	1 Unit	21.000.000	Pengadaan mebeleur	BPKAD	Pengadaan paket pengadaan mebeleur	1 Unit	100.000.000	
41	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	BPKAD	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	49.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	BPKAD	Terpeliharanya gedung kantor BPKAD	1 Unit	26.620.000	
42	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	BPKAD	Jumlah pemeliharaan mebeleur	1 Paket	7.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	BPKAD	Terpeliharanya mebeleur kantor	1 Paket	35.000.000	
IX	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
43	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	BPKAD	Jumlah Paket Bimtek Workshop dan semknar terkait pengelolaan keuangan daerah	1 Paket	63.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	BPKAD	Jumlah Paket Bimtek Workshop dan semknar terkait pengelolaan keuangan daerah	1 Paket	66.550.000	
	JUMLAH TOTAL				71.837.160.000					11.741.148.000	

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program/Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Rincian usulan kegiatan yang masuk dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah/Kegiatan Penunjang Urusan/Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	449 Desa	Jumlah Desa yang mendapat bantuan keuangan desa	1 paket	Rp. 21.226.000.000 (PAD/DAU)

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya mengenai aset daerah, dan saat ini masih terus dilakukan sinkronisasi aset dan pemeriksaan aset ke Perangkat daerah agar diperoleh laporan aset yang akurat dan akuntabel sehingga akhirnya Kabupaten Kebumen bisa kembali memperoleh opini WTP hasil audit Laporan Keuangan tahun 2019. Selain itu berkait dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, di Kabupaten Kebumen sendiri sudah dibuat Peraturan Bupati Kebumen nomor 20 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual, untuk itu saat ini sedang disempurnakan system pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini penting, karena pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk mengamankan Barang Milik Daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, dan mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional berikutnya tentang Transaksi Non Tunai/TNT. Transaksi Non Tunai / TNT adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan

menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, EDC dan CMS atau sejenisnya.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota angka 2 disebutkan bahwa *“Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi Penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan Pengeluaran daerah yang dilakukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.”*

Oleh karenanya, untuk melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Pemerintah daerah, yang didukung oleh Menteri PPN/KBPPN bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala BPKP. Karena itu semua Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional. Pemerintah Daerah dapat menginisiasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diluar Instruksi Presiden ini, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/KBPPN.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dikeluarkan Surat Bupati Kebumen Nomor 900/2367 tanggal 10 November 2017 tentang Pemberitahuan Transaksi Non Tunai (kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri) angka 2 dan 3 bahwa *“Terhadap pelaksanaan transaksi non tunai akan ditingkatkan secara bertahap dan dimulai tahun 2018, pada tahap awal dibatasi atas transaksi pembayaran di atas Rp.5.000.000,00, “Dalam rangka tertib administrasi akan disusun Peraturan Bupati tentang system pembayaran dan penerimaan non tunai dan akan diperbaharui sesuai tahapan perkembangannya”*. Dan selanjutnya di susun Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam

Penerimaan dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.”

Selanjutnya mulai tahun 2019, diberlakukannya transaksi non tunai pada penerimaan dan pembayaran belanja daerah, untuk nilai transaksi diatas Rp. 3.000.000,00/kwitansi. Bahwa belanja dengan nominal diatas Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 per kwitansi, menggunakan transaksi non tunai, atau transaksi dibawah Rp. 3.000.000,00 tetapi menggunakan transaksi non tunai, dengan dokumen pendukung lembar notifikasi atau bukti pemindahbukuan, hal ini berdasarkan surat edaran Bupati Kebumen Nomor : 900/0073 tanggal 11 Agustus 2019 tentang Peningkatan Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah.

Manfaat implementasi transaksi non tunai yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, menekan laju inflasi, mencegah transaksi illegal (korupsi), meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*), dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

Disamping itu, untuk melaksanakan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tahun 2020 disusun Analisa Standar Belanja, ini merupakan kegiatan baru yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Penyusunan Analisis Standar Belanja. Sejalan dengan hal tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Disisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 89 huruf e disebutkan bahwa “dokumen

sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional adalah Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web dapat yang diakses melalui *browser web* seperti *Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome*, dan browser lainnya. Basis data (*database*) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil dari aplikasi SPAN utama (*care SPAN*). Pengambilan data tidak dilakukan secara realtime, namun dengan jeda waktu tertentu. Jika terdapat perbedaan informasi yang disajikan oleh Aplikasi OM-SPAN dengan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, maka yang dipergunakan adalah informasi yang dihasilkan dari Aplikasi SPAN. Hal ini berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.01/2009 tentang Kebijakan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di lingkungan Departemen Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa;
5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Nomor PER-4/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Dana Desa pada Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).

#### B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021, tema pembangunan tahun 2021 adalah “Pemantapan Perekonomian Daerah Menuju Agrobisnis Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Prioritas pembangunan tahun 2021 antara lain :

1. Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
2. Pemanfaatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
5. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BPKAD Kabupaten Kebumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di BPKAD mendukung prioritas ke-5 (Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih), dengan prioritas Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan, serta arah kebijakannya itu meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik.

Prioritas ini mendukung Misi 6 Bupati Kebumen Tahun 2016-2021 yaitu “Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan

jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan BPKAD, tujuan dan sasaran rencana kerja BPKAD tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)	Target 2021
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1. Opini BPK atas LKPD	WTP
	2. Meningkatnya Layanan Kinerja BPKAD	2. Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD	96%
	3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah	3. Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	95%

6. PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENCAPAIAN IKU DAERAH DAN IKU PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja BPKAD Tahun 2021 mencakup 3 program yang terdiri dari 9 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang terkait program, dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - a) Penyusunan KUA dan PPAS
  - b) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
  - c) Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
  - d) Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
  - e) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
  
- b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  - b) Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
  - c) Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
  - d) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
  
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - a) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - b) Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
  - c) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

- d) Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
  - d. Kegiatan Kegiatan Penunjang Urusan
    - a) Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi
    - b) Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
    - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah
    - b) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Miik Daerah
    - c) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Miik Daerah
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
    - b) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
    - d) Penyusunan Lap oran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Umum
    - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
    - d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
    - e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
    - f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
    - g) Penyediaan Alat Tulis Kantor
    - h) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - k) Penyediaan Makanan dan Minuman
  - l) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - m) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - n) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - o) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - p) Pengadaan Mebeleur
  - q) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - r) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2019 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 6  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2018	WTP	WTP atas LKPD 2019	100%	WTP	WTP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa

Pengecualian, Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, Kabupaten Kebumen kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan kali keenam dan tiga tahun berturut-berturut Kabupaten Kebumen memperoleh Opini WTP, setelah sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 dan sekarang 2019.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-uundangan; dan
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Untuk mencapai sasaran diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan indikator kinerja OPD pencapaian sasaran 2 dan sasaran 3 sebagai berikut :

#### Capaian Kinerja Sasaran 2

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Prosentase capaian kinerja pelayanan	94%	94%	95,44%	95,44%	96%	96%

OPD						
-----	--	--	--	--	--	--

Persentase capaian kinerja pelayanan OPD daerah diukur dari terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya jumlah sarana prasarana kantor yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah dan tersedianya dokumen database perangkat daerah serta jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya.

Capaian Kinerja Sasaran 3

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 8  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Indikator Program	Realisasi 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan asset		95,50%	92,50%	94,54%	94,54%	95%	95%
	Capaian realisasi belanja	92,46	90	92,17	92,17	90	90
	Capaian Penerbitan Dokumen Keuangan Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
	Capaian SKPD Tertib Adminis	90	80	85,60	85,60	83	83

	trasi Aset Tepat Waktu						
	Capaian Realisasi Pendapat an	99,72	100	100,38	100,38	100	100
	Jumlah SKPD yang mengirim SPJ Fungsional Tepat Waktu	171	198	171	171	198	198
	Tersedian ya data rekonsilia si pelaporan keuangan daerah	1	1	1	1	1	1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 BPKAD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran renja ini;

--133--

BAB V  
PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga *cost*- nya.

Rencana Kerja PD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2021. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari BPKAD, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPKAD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKAD tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Kebumen tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati BPKAD Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder BPKAD Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 30 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Indri Xuliantu, SE .M.Ec	
Amilah Thamrin, S.STP	

  
Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740529 190303 1 001